

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJADIKAN SAGU
SEBAGAI MAKANAN POKOK SELAIN BERAS
DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

***LOCAL GOVERNMENT POLICY IN MAKING SAGO
AS A FOOD OUTSTANDING RICE
IN SOUTH SORONG DISTRICT***

Kahar Gani¹ dan Indra Wijaya²

Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Pancasakti

e-mail: kahargani070@gmail.com

Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

e-mail: wijaya.indra127@nobel.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan sagu sebagai makanan pokok selain beras di Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan sagu sebagai makanan pokok selain beras di Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian melakukan wawancara langsung kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Sekretrias Dinas Pariwisata dan Promosi, Kepala Seksi Tanaman Pangan Kabupaten Sorong Selatan, tokoh masyarakat, masyarakat/petani, total informen 10 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan sagu sebagai makanan pokok selain beras di Kabupaten Sorong Selatan pada aspek advokasi dilakuakn dengan membuka peluang investasi pembangunan pabrik dan pengolahan sagu pada PT. Perum Inhutani dan dan PT. Austindo Nusantara Jaya, pada aspek kampanye mengenai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 kepada seluruh pimpinan dan staf Satua Kerja Perangkat Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat, pada aspek promosi dan sosialisasi dilakukan dengan cara mengajak segenap pemerintah dan masyarakat membudayakan makanan sagu pada setiap kegiatan rapat, forum pertemuan, iklan, brosur, juga pada kegiatan simposium sagu skala internasional di Universitas Rikkyo, Tokyo-Jepang, aspek pendidikan komsumsi dilakukan pelatihan 60 ibu rumah tangga membuat aneka makanan dari sagu, aspek penyuluhan dilakukan cara pelatihan mengenai pembuatan makanan tambahan bayi sesuai kandungan gizi dan manfaatnya, aspek pembinaan industri usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara memfasilitasi pembuatan izin usaha, pelatihan, bantuan alat modern, aspek pengembangan teknologi dilakukan dengan bimbingan teknis inovasi teknologi pengembangan sagu.

Kata Kunci: Kebijakan, Makanan Pokok, Pemerintah Daerah

Abstract

The problem discussed in this research is the regional government's policy in making sago a staple food other than rice in South Sorong Regency. This research aims to understand and analyze local government policies in making sago a staple food other than rice in South Sorong Regency. This research use descriptive qualitative approach. The research instrument conducted direct interviews with the Regional Secretary, Head of the Food Security Agency, Head of the Agriculture Service, Secretariat of the Tourism and Promotion Service, Head of the Food Crops Section of South Sorong Regency, community leaders, community/farmers, a total of 10 informants. The results of the research show that the regional government's policy of making sago a staple food other than rice in South Sorong Regency in the advocacy aspect is carried out by opening up investment opportunities for factory construction and sago processing at PT. Perum Inhutani and and PT. Austindo Archipelago meeting activities, meeting forums, advertisements, brochures, also at the international scale sago symposium at Rikkyo University, Tokyo-Japan, in the consumption education aspect, training was carried out for 60 housewives to make various foods from sago, the education aspect was carried out on how to make additional baby food according to nutritional content and benefits, aspects of developing micro, small and medium business industries by facilitating business permits, training, assistance with modern tools, technological development aspects are carried out with technical guidance on technological innovation for sago development.

Keywords: Policy, Staple Food, Local Government

PENDAHULUAN mengurangi gangguan kehidupan biota di
 Penganeekaragaman konsumsi pangan suatu kawasan, meningkatkan pendapatan
 akan memberi dorongan dan insentif pada
 penyediaan produk pangan yang lebih petani, dan menunjang pelestarian
 beragam dan aman untuk dikonsumsi, sumberdaya alam. Upaya pengembangan
 termasuk produk pangan yang berbasis konsumsi pangan dapat pula dijadikan
 sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas salah satu momentum bagi Pemerintahan
 produksi, penganeekaragaman konsumsi Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat
 pangan dapat meminimalkan risiko usaha pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.
 pola monokultur, meredam gejolak harga, Berdasarkan data yang telah dirilis
 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Republik Indonesia (BNPT RI) tinggal sedikit sehingga oleh masyarakat pada tanggal 25 Januari 2011), sagu biasanya dibiarkan mati.”Tanaman sagu memiliki banyak kandungan, diantaranya:

- | | |
|---|--|
| 1) Organik | kemudian di rumpun yang sama ada |
| 2) Kadar pati tinggi dan rendah protein (Tahan disimpan lama) | anakan yang siap ditebang lagi, begitu seterusnya. |
| 3) Memiliki IG rendah dan Kadar RS tinggi | |
| 4) Pangan sehat | |
| 5) Asli produk Indonesia | Potensi pati sagu Papua ini sudah |
| 6) Tahan terhadap genangan air akibat banjir | melebihi volume impor gandum nasional |
| 7) Tahan terhadap kekeringan | |
| 8) Produktivitas pati tinggi: | yang menurut data United States |
| - Sagu : 10-15 ton/ha/th | Department of Agriculture (USDA) pada |
| - Padi : 3 ton/ha/th | tahun 2017/2018 mencapai 11,5 juta ton. |
| - Jagung : 5 ton/ha/th | |
| - Kentang : 2.5 ton/ha/th | Bintoro mengatakan, jika industri tepung |
| - Ubikayu : 5-6 ton/ha/th dan | terigu mau memakai tepung sagu 10 persen |
| - Ubijalar : 5,5 ton/ha/th | |
| 9) Kandungan polifenolnya tinggi yg baik untuk antioksidan. | |

Pohon sagu yang ada di Kabupaten Sorong Selatan adalah bagian dari 5,2 juta hektar yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hutan sagu itu terlihat rimbun, namun sebagian telah keluar bunga “tanduk rusa” di pucuknya yang menandai sebentar lagi akan mati. Menurut Kepala Regional PT ANJAP, Christianus SA. “Jika sudah lewat masa panennya, tidak bisa dipanen lagi karena patinya

saja sebagai campurannya, hal itu sudah bisa menghemat devisa negara. PT ANJ Austindo Papua (ANJAP) adalah usaha pengelola sagu di Sorong Selatan rata-rata dihasilkan dapat mencapai 15,6 juta ton tepung sagu per tahun. Menurut MH Bintoro, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ketua Masyarakat Sagu Indonesia, “Potensi pati sagu Papua ini sudah

melebihi volume impor gandum nasional, Adapun pengolahan data yang Papua seharusnya tak ada masalah kurang dilakukan yaitu dengan menggunakan pangan dan gizi buruk, seperti terjadi analisa kualitatif dengan langkah-langkah Asmat awal tahun ini. Habitat sekitar hutan sebagai berikut :

sagu biasanya kaya ikan dan udang dan 1) Tahap pengumpulan data
juga aneka binatang buruan.” Dengan 2) Reduksi data
segala potensinya, sagu Papua saat ini 3) Display data
justru termajinkan dalam peta pangan 4) Verifikasi
nasional. Bahkan, di Papua sendiri, 5) Penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

masyarakatnya juga mulai meninggalkan (Kompas.id. 27 September 2018).

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1 ayat 1 bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri gizi yang dapat mendukung hidup sehat, Pertanian Nomor 9 Tahun 2014 Tentang aktif dan produktif.

Pedoman Gerakan Percepatan Menurut Warto (2011) sumber daya Penganekaragaman Konsumsi Pangan lokal menekankan pada potensi atau aset (P2KP) bahwa penganekaragaman pangan yang dimiliki oleh daerah setempat.

adalah upaya peningkatan ketersediaan dan Suryana (2005) menyebutkan kriteria konsumsi pangan yang beragam, bergizi utama bagi keberhasilan pengembangan seimbang, dan berbasis pada potensi usaha pengolahan adalah efisiensi, sumber daya lokal. efektifitas, kualitas dan fleksibilitas. Untuk

Menurut Soetrisno (2003) meningkatkan efisiensi diperlukan biaya penganekaragaman konsumsi pangan rendah dan peningkatan produktifitas yaitu; tenaga kerja. Efektifitas mencakup

“Sebagai upaya kemampuan pelayanan bagi pemasaran dan menganekaragaman jenis pangan yang teknis penanganan produksi. Agar produk dikonsumsi, mencakup pangan sumber sagu yang diproduksi dapat dijual maka energi dan zat gizi, sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi sesuai dengan kecukupan baik ditinjau dari perlu dibuka pasar. kuantitas maupun kualitas.”

Berdasarkan pengertian tersebut Dalam pandangan Alfons dan Rivai diketahui bahwa penganekaragaman (2011) melihat kebijakan ketahanan pangan menyebutkan bahwa;

konsumsi pangan merupakan upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang dalam jumlah dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan “Kebijakan ketahanan pangan dalam pelaksanaannya memanfaatkan semaksimal mungkin pangan lokal merupakan suatu langkah yang sangat tepat, karena pangan lokal tersedia dalam jumlah yang cukup di daerah dan mudah dikembangkan karena sesuai agroklimat setempat.”

Dalam fokus tulisan tentang sago sebagai salah satu komoditas tanaman difokuskan pada kegiatan advokasi merupakan pangan lokal bagi masyarakat tersebut, peneliti menanyakan kepada di beberapa wilayah memiliki peluang Bapak Dance y. Flasy, SE. selaku pengembangan yang sangat strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong sebagai komponen ketahanan pangan Selatan mengenai langkah-langkah yang dalam memantapkan ketahanan pangan dilakukan dalam kegiatan tersebut, lokal maupun nasional. Untuk itu pola menurut informan.

kemitraan perlu dibangun antara petani, pemerintah daerah dan pihak swasta (induk/pembeli).

Advokasi

Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan advokasi dimaksud disini adalah upaya persuasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan tersebut terlihat langkah kongkrit berbasis sumber daya lokal, dalam hal ini pemerintah daerah dalam rangkan adalah sago yang mencakup kegiatan : penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi kepada masyarakat.

“Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, kami langsung menghitung luas potensi tanaman dan produksi di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, setelah itu membuka kran investor dalam bentuk pabrik pengolahan, sebab tak mungkin bisa jika hanya mengandalkan pengolahan manual seperti selama ini, selanjutnya memberikan pengarahan dan argumentasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat penganekaragaman makanan sago”.

Berdasarkan hasil wawancara penganekaragaman konsumsi pangan tersebut terlihat langkah kongkrit berbasis sumber daya lokal, dalam hal ini pemerintah daerah dalam rangkan adalah sago yang mencakup kegiatan : percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, yaitu sago sebagai sumber bahan pokok selain beras. Pemetaan hutan sago di Kabupaten

Sorong Selatan yang diteliti oleh tim tahap awal, produksi pabrik ini hanya 50% peneliti Kajian Pangan Lokal Universitas dari kapasitas produksi 1.000 ton per hari. Negeri Papua (UNIPA), membuktikan Pabrik Sago Perhutani sampai 2017, pabrik bahwa luas hutan sagu di Kabupaten tersebut belum beroperasi penuh sesuai Sorong Selatan ini mencapai 750.000 kapasitas produksinya. Pabrik tersebut Hektar, tersebar di 8 distrik dengan potensi berdiri di atas lahan seluas 8 Ha, seluas 3 pati sagu sebesar 2,9 juta ton. Areal sagu Ha. digunakan sebagai tempat terluas terdapat di distrik Kais sebesar 63,8 penbangunan power plant. Pabrik sagu ribu ha, Kokoda 61,3 ribu ha, Inanwatan tersebut nantinya akan mengolah batang 55,5 ribu ha, Saefi 39,6 ribu ha dan pohon sagu menjadi tepung sagu. Kokoda utara 34,5 ribu ha. Kerapatan Perhutani akan membeli batang-batang pohon sagu masa tebang setiap ha sagu dari masyarakat Distrik Kais.

mencapai 67 pohon dan diameter rata-rata 41,2 cm dengan tinggi pohon 9,9 m. Estimasi produksi sagu mencapai 9,7 ton per ha. Luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan data remote sensing adalah sebesar 694.221 ha dan luas areal sagu 311.591 ha. Dengan demikian luas areal sagu mencapai 44,88 persen dari luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Pabrik yang dibangun Perhutani sejak 2013 itu akan memulai operasionalnya awal tahun 2016 . Untuk

Kampanye

Kampanye dimaksud disini dalam rangka penyadaran/*awarness* kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya sagu. Diketahui bahwa pengetahuan tentang penganeekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang. Maka faktor penting pertama adalah bagaimana memberikan

pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat bahwa makanan bukan hanya beras, untuk itu dilakukan kampanye penganeekaragaman pangan ini.

Bagaimana kegiatan ini dilakukan, peneliti menanyakan kepada Bapak Alfius Kondororik, SP. selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan, menurut informan;

Belum semua pemangku kebijakan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat mengetahui adanya perpres ini (Perpres no 22 tahun 2009) tentang percepatan kebijakan P2KP berbasis sumber daya lokal itu, untuk itu perlu ada kampanye, agar tahu dan memahami bahwa kebijakan ini penting, dan terkait dengan itu nantinya akan ditindak lanjuti dengan realisasi dan anggaran..itu pentingnya kampanye kebijakan.

Adapun pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sangat banyak, antara lain pimpinan dan staf SKPD dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini, mereka bekerja sama dalam wadah yang disebut Tim Teknis, Tim inilah yang nantinya bertugas dalam melaksanakan kebijakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal ini. Kerjasama

ini penting karena kebijakan ini tidakan akan bisa berjalan tanpa dukungan semua pihak.

Seperti yang di sampaikan oleh Dinan Aragae, SP. selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan

Selama ini kebijakan penganeekaragaman pangan seolah-olah hanya tanggungjawab sektor pertanian, padahal untuk konsumsi pangan banyak pihak yang terlibat disitu, agar semua pihak itu merasa berkepentingan dan terlibat untuk pelaksanaan penganeekaragaman konsumsi pangan, di kabupaten itu dibawah langsung kendali Bupati dalam forum dewan ketahanan pangan kabupaten, nanti dari implementasi kebijakan akan ditindak lanjuti oleh semua SKPD yang terkait,dan pemangku kepentingan, misalnya Tim Penggerak PKK, perguruan tinggi, kemudian LSM ini disini sudah banyak terimplementasi disini.”

Untuk memperlancar kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, maka dibentuk tim teknis dengan keanggotaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang terkait yang penganeekaragaman pangan.

Promosi dan sosialisasi

Promosi dan sosialisasi dimaksud disini dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi

pangan berbasis sumber daya sagu. berupa potensi pangan yang belum Kegiatan ini dalam bentuk iklan pada dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, media cetak dan elektronik serta antara lain: sagu, umbi-umbian, daging mengadakan kegiatan makan bersama. kelinci, dan sebagainya. Di banyak daerah

Salah Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan promosi dan sosialisasi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya sagu adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan kegiatan promosi produk pangan lokal tahun. Kegiatan itu berlangsung di aula P3W, Senin (15/10/2018) dengan maksud untuk mempromosikan pangan lokal yang ada di kabupaten tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Katahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan mengajak masyarakat untuk membudayakan makanan lokal/ sagu, karena makanan lokal merupakan ciri khas orang papua.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Alfius Kondororik, SP. selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan, bahwa:

Tim penggerak PKK semacam organisasi masyarakat yang sudah mengakar, organisasi adat organisasinya sudah mantap walaupun tidak birokrasi tetapi berhimpitan dengan birokrasi, TP PKK mempunyai jaringan yang sudah kuat dan sudah mengakar diberbagai tingkatan baik tingkat desa, distrik, maupun kabupaten dan terbagi dalam pokja-pokja kelompok kerja kita melibatkan, kita beri materi agar dalam pertemuan-pertemuan rutin PKK mereka itu disampaikan, karena pendidikan konsumsi pangan ini sasaran utamanya adalah ibu-ibu, ibu-ibu dalam rangka menyajikan menu makanan sehari-hari . Lewat tim penggerak PKK itu yang paling efektif karena mereka itu ada pertemuan pertemuan.

Menurut Sumardjo (Rossi, 2010), perlunya mempertajam pentingnya sosialisasi kebijakan. Namun jika kebijakan sudah diambil, sosialisasi tentang kebijakan tersebut sangat diperlukan.

Beberapa jenis pangan lokal yang sudah dikelola dengan baik dan mempunyai nilai ekonomis tinggi antara lain: beras, jagung, daging, telur, dan ikan. Namun, sebagian pangan lokal masih

Hal tersebut juga dibenarkan Esau Woloin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa kami sudah diberikan promosi dan sosialisasi tentang penganeekaragaman pangan berbasis

sumber daya lokal dan Perpres Nomor 22 Tahun 2009 pada bulan Oktober 2018 bersama dengan Kepala SKPD terkait, Kepala Distrik dan LSM.

Pendidikan Konsumsi

Pemkab Sorong Selatan (Sorsel) terus berupaya meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk Perempuan Papua. Untuk itulah Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) menggelar pelatihan pembuatan makanan berbahan sagu bagi perempuan Papua.

Mengingat potensi sagu di Kabupaten Sorsel sangat besar, sehingga terbuka peluang besar untuk mengolah komoditi sagu menjadi berbagai produk makanan. Pelatihan yang digelar selama 4 hari sejak tanggal 27-30 Mei 2015, bertempat di Aula P3W GKI di Tanah Papua dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Perekbang) Setda Kab. Sorsel Drs.

Menase Thesia, M.Si. Mengenai kegiatan

tersebut, peneliti menanyakan kepada Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Perekbang) Setda Kab. Sorsel Drs. Menase Thesia, menurut informan;

“Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kandungan makanan yang terbuat dari sagu, bagaimana membuat aneka ragam makanan dari sagu, diversifikasi makanan, sehingga digelar selama 4 hari, ini diikuti antusias peserta.”

Perempuan Papua yang ikut dalam pelatihan pembuatan makanan berbahan sagu sebanyak 60 orang, dibagi dalam 8 kelompok. Pihak KPP Sorsel mendatangkan instruktur langsung dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Indonesia, guna melatih perempuan Papua membuat berbagai jenis makanan berbahan sagu. Hadir dalam pembukaan kegiatan pelatihan tersebut antara lain Sekretaris Bappeda Suroso, Kepala Dinas Perindagkop Nimrod Nauw dan Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Hanok Thesia.

Penyuluhan

Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Pegawai Puskesmas Kokoda mengadakan Pelatihan Pengolahan Makanan Sehat dan Pembuatan Jenis Makanan Baru Berbahan Dasar Lokal Sagu di SMP N 1 Kokoda, 26 Oktober 2017. Kegiatan ini menyasar Ibu-ibu Kader Kesehatan Puskesmas Kokoda, dan dihadiri 30 orang peserta. Dalam kegiatan kali ini disampaikan juga tentang Pentingnya Makanan sehat dan cara pengolahan makanan, disampaikan oleh Nurhapna, Amd.Keb., S.KM. Materi Pembuatan cendol berbahan sagu disampaikan oleh Trisnawati Kasengke, Amd. Farm. Pembuatan agar-agar pucuk sagu, disampaikan oleh Musdalipah Amd. Keb.

Selain itu juga ditampilkan sistem mengolah sagu secara tradisional dan

memperagakan proses pengolahan aneka kue berbahan dasar sagu Festival Sagu Distrik Kais 2017 yang berlangsung sehari yang digalang oleh para Mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang melaksanakan KKN-PPM di wilayah Distrik Kais ini, mendapat apresiasi dan sambutan positif dari Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sorsel, khususnya masyarakat di wilayah Distrik Kais dan sekitarnya. Bupati Sorsel, Samsudin Anggiluli, SE dalam sambutannya mengatakan;

“Ini luar biasa. Adik-adik mahasiswa sudah membantu Pemerintah Sorsel untuk memperkenalkan potensi yang ada di sini. Walau pun festival ini dilaksanakan di distrik, namun ini merupakan ajang promosi potensi kekayaan kita ke seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri.”

Bupati Samsudin juga memperkenalkan bahwa, wilayah Sorong Selatan dan khususnya di wilayah Imekko termasuk Distrik Kais, merupakan wilayah yang memiliki luas sagu terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia.

Selain memberikan sambutan terkait seimbang dana aman maka perlu didukung penyelenggaraan festival sagu tersebut, dengan ketersediaan pangan tersebut di bupati dihadapan masyarakat yang hadir masyarakat, disinilah peran dari swasta dan menyampaikan beberapa hal yang dunia usaha pangan. Seperti yang di berhubungan dengan layanan sampaikan oleh Kepala Seksi pemerintahan yang telah berjalan Kewaspadaan dan Penganekaragaman normal. Pada momen baik ini juga dirinya Pangan Kantor Ketahanan Pangan menjelaskan tentang visi dan misi program Kabupaten Sorong Selatan:

pembangunan daerah lima tahun mendatang. Baik itu berhubungan dengan bidang layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pembangunan pemberdayaan masyarakat.

Pembinaan UKM

Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan. Pelibatan swasta dan dunia usaha khususnya industri pangan akan sangat mendorong pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan ini. Setelah kegiatan internalisasi konsumsi pangan berhasil dan masyarakat telah sadar akan pola konsumsi yang beragam, bergizi

”Kegiatan ini (pengembangan bisnis dan industri pangan lokal) jelas melibatkan swasta dan dunia usaha, karena pelaksana dilapangkan dunia usaha untuk industri pangannya.”

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal ini yang pertama adalah pemberian fasilitasi kepada dunia usaha di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Soorong Selatan, pemberian fasilitasi ini dikhususkan kepada Kelompok Wanita Tani, karena untuk usaha yang dimiliki perorangan fasilitasi ini akan disampaikan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan

tercapai apabila upaya internalisasi Lebih lanjut Peraturan Presiden No. didukung dan berjalan seiring dengan 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengembangan bisnis pangan. Oleh karena pengembangan bisnis dan industri pangan itu program penganekaragaman konsumsi lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

pangan nasional dan daerah perlu 1) Fasilitasi kepada UMKM untuk diselaraskan, khususnya dalam pengembangan bisnis pangan segar, pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna aman berbasis sumber daya lokal. 2) Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

memajukan perekonomian wilayah.

Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta **Pengembangan Teknologi** memerlukan rencana bisnis dan industri Mengingat pentingnya akselerasi aneka ragam pangan yang komprehensif. diseminasi hasil-hasil teknologi tersebut Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka kepada masyarakat, menjadi dasar bimtek ragam pangan tersebut perludikembangkan digelar. Diyakini kegiatan juga untuk membangun sistem inovasi nasional memberdayakan perempuan melalui dan daerah guna merangsang pematapan penciptaan produk berbasis sagu berdaya pelaksanaan penganekaragaman konsumsi saing tinggi di pasar global, lantaran Papua dan Papua Barat merupakan daerah pangan di berbagai daerah. Dalam rencana destinasi wisata yang terkenal di industri swasta nasional dan daerah mancanegara. Sedangkan Sekda Sorsel, khususnya dalam program pengembangan menekankan pentingnya kelembagaan dan industri aneka ragam pangan. membangun pola kemitraan antara industri dan petani. Pemerintah Daerah (Pemda)

Sorsel pun berterima kasih dan menyambut baik pelaksanaan bimtek. Peserta diharapkan menyerap ilmu dari para narasumber untuk pengembangan sagu.

Beberapa produk kue dan mi dari sagu, sudah dihasilkan kelompok tani dan kelompok wanita, selain produk tradisional lain seperti papeda. Namun, masih ada beberapa kendala, meliputi akses jalan kebun belum memadai, kurangnya alat pengolahan sagu dan teknologi diversifikasi produk, serta pemasaran produk karena jauhnya jarak Sorsel ke Ibu Kota Kabupaten.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilihat dari aspek advokasi telah dilakukan dengan membuka peluang bagi investor.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya

lokal dilihat dari aspek kampanye dilakukan dengan terlebih dahulu mensosialisasikan Perpres No. 22 tahun 2009 tentang percepatan kebijakan P2KP berbasis sumber daya lokal kepada seluruh pimpinan dan staf SKPD dan pemangku kepentingan.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilihat dari aspek promosi dan sosialisasi telah dilakukan dengan cara mengajak segenap stakeholders.
4. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilihat dari aspek pendidikan konsumsi telah dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) menggelar pelatihan 4 hari kepada 60 orang peserta pembuatan makanan dan minuman berbahan sagu.
5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilihat dari aspek penyuluhan telah dilakukan dengan baik. Teknologi Pertanian (BBP2TP) kepada 200 petani.

Saran

6. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilihat dari aspek pembinaan industri UKM telah dilakukan dengan cara pemberian fasilitas kemudahan dalam kelengkapan izin usaha, dan alat usaha/mesin untuk usaha, kemudian pelatihan dan promosi hasil produksi UKM tersebut.
 7. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilihat dari aspek pengembangan teknologi dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mengenai bimbingan teknis Inovasi Teknologi Mendukung Pengembangan Perkebunan Sagu di Sorong Selatan, bekerjasama dengan Balai Besar Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian (BBP2TP) kepada 200 petani.
1. Pada aspek advokasi agar membuka kran investasi tambahan, tidak hanya dua perusahaan, bahkan bila perlu investasi asing/PMA, sehingga semakin banyak yang mengelola tanaman sagu menjadi olahan makanan internasional, serta membuka lapangan kerja tambahan baru.
 2. Pada aspek kampanye agar semakin gencar menganjurkan makanan sagu sebagai makanan wajib bagi setiap kegiatan pemerintah, pesta rakyat, resepsi, dan hidangan tamu atau wisatawan, selain itu aktif mengikuti even-even kuliner nasional dan internasional.
 3. Pada aspek promosi dan sosialisasi agar setiap sudut-sudut jalan protokol memasang iklan makanan terbuat dari sagu, serta aktif pada mensosialisasikan potensi sagu Sorong

- Selatan sebagai lumbung sagu, sehingga penikmat sagu nasional dan internasional dapat membeli sagu asal Sorong Selatan
4. Pada aspek pendidikan konsumsi agar mencari resep khas sagu yang memiliki cita rasa asal Sorong Selatan menjadi favorit dan berbeda dengan sagu asal daerah lain, caranya melakukan festival chef berkualitas nasional dan internasional untuk mencari formula sagu yang bercita rasa tinggi.
5. Pada aspek penyuluhan agar konsisten dan menyeluruh melakukan penyuluhan tentang manfaat dan kandungan gizi sagu kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang masih tinggal di pelosok daerah
- dan belum terjangkau informasi dan teknologi.
6. Pada aspek pembinaan industri UKM agar mengusahakan bantuan dana dan peralatan modern kepada masyarakat, misalnya kelompok tani atau kelompok usaha bersama, sehingga masyarakat yang tidak termasuk dalam pegawai perusahaan dapat juga mandiri mengelola sagu. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk berkelompok dan atau pinjaman bergilir atau menjadi anak usaha dari perusahaan besar.
7. Pada aspek pengembangan teknologi agar pemerintah terus menggandeng Kementerian lain supaya konsisten dilakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat jika terdapat teknologi baru pengolahan sagu.

REFERENSI

- Alfons, J.B. dan Arivin, A. Rivai. 2011. *Sagu Mendukung Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim. Jurnal Perspektif Vol 10 No 2.*
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Rossi, Prabowo. 2010. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia *Mediagro* 62 Vol 6. No 2, 2010: Hal 62 – 73, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Suryana, A.. 2005. Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Bogor. IPB.

Sutrisno. 2003. Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi). Edisi Pertama Cetakan Kedua. Yogyakarta. EKONISIA.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Warto. 2011. *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan dalam Upaya Penanganan Kemiskinan*. Yogyakarta. B2P3KS Press